



# RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
Jalan Urip Sumoharjo No. 269 Makassar

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mengamanatkan penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah yaitu RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah), RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan penyusunan Dokumen Rencana Perangkat Daerah, dalam hal ini penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah adalah rencana strategis perangkat daerah periode 5 tahunan yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Wajib dan/atau urusan Pemerintahan Pilihan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif; sedangkan Renja Perangkat Daerah adalah rencana kerja perangkat daerah periode 1 tahun yang memuat program, kegiatan, sub keegiatan, lokasi dan kelompok sasaran disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah).

Rencana Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) dan tetap memperhatikan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga. Renja Perangkat Daerah ini menjadi acuan bagi Kabupaten/Kota dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tingkat Kabupaten/Kota.

Renja Perangkat Daerah ini akan menjadi acuan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka mewujudkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2024 - 2026.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan merupakan organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sesuai Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 07 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk itu, agar pelaksanaan tugas yang diberikan berjalan efektif dan terarah maka penyusunan dan penetapan Rencana Kerja OPD menjadi mutlak sebagai pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas pada tahun berjalan.

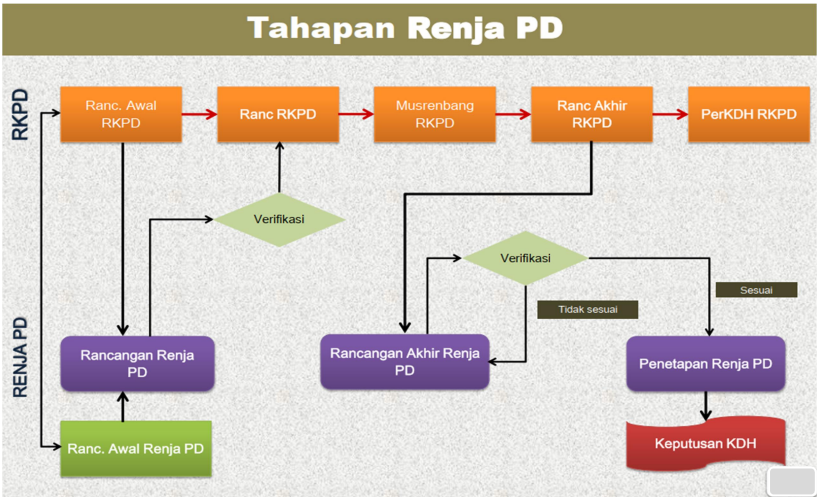
Dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*, sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*), yaitu pemerintah lebih focus pada pencapaian kinerja yang lebih baik.

Proses penyusunan rancangan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana kerja Perangkat Daerah (RKPD). Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Kerja (Renja) Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan atau paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (renja) Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah.

Selanjutnya tahapan penetapan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, dan Kepala OPD menetapkan Renja Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD yang digunakan dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berjalan.

Dimana prinsip penyusunan Rencana Kerja (Renja) antara lain :

1. Substansi Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan perbaikan dari materi Rancangan Renja Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan Perkada RKPD;
2. Program dan Kegiatan dirinci berdasarkan sumber dana yang diusulkan;
3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran, target capaian program/kegiatan, target keluaran kegiatan, total dana yang diperlukan kegiatan.
4. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen resmi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA OPD setelah memerhatikan nota kesepakatan kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).



Gambar : Bagan Alur Tahapan Renja PD

Adapun persiapan penyusunan Renja dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Persiapan penyusunan Renja
  - Pembentukan Tim Penyusun Renja;
  - Orientasi mengenai Renja;
  - Penyusunan Agenda Kerja Tim Kerja;
  - Pengumpulan data dan informasi.
- b. Pengelolah Data dan informasi

Tahap pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menyajikan seluruh kebutuhan data dari laporan hasil analisis menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis, dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak-pihak terkait di tiap tahap perumusan penyusunan rancangan Renja.
- c. Tahap perumusan Rancangan Renja
  - Pengolahan data dan informasi;
  - Analisis gambaran pelayanan OPD;
  - Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah;
  - Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD;
  - Telaahan terhadap rancangan awa RKPD;
  - Perumusan tujuan dan sasaran;
  - Penelaaham usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
  - Perumusan kegiatan prioritas;
  - Penyajian awal dokumen rancangan Renja Perangkat Daerah;
  - Penyempurnaan rancangan rencana kerja Perangkat Daerah;
  - Pembahasan Forum Perangkat Daerah;
  - Penyesuaian dokumen rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah;

- Penyajian dan penyampaian rancangan Rencana Kerja;
- Verifikasi dan penyempurnaan rancangan Rencana Kerja yang mengacu pada rancangan akhir RKPD;
- Penetapan Renja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja (Renja) sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan dilingkup OPD merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari system perencanaan pembangunan dari proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan-tahapan dan dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan keterkaitan yang erta antara satu dengan lainnya.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja;
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 315);
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pengawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 550);
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 1447)
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 548);

- 19) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan : (7/2015, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
- 20) Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1);
- 21) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 309);
- 22) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019, Nomor 1);
- 23) Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 50);
- 24) Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 30);
- 25) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1. Maksud**

Maksud Penyusunan Rencana Kerja adalah untuk memenuhi regulasi kebijakan yang berkembang, perencanaan yang menjadi rujukan, isu strategis dan sebagai instrument perencanaan dan penganggaran periodik berfungsi sebagai berikut:

- a. Sebagai acuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengaplikasikan perencanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun anggaran;
- b. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan sesuai dengan tupoksi OPD;
- c. Menjadi tolok ukur penilaian kinerja serta sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan bagi OPD.

2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan adalah :

- a. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2024 dalam melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan;
- b. Perwujudan efisiensi dan efektifitas dalam alokasi sumber daya berdasarkan pertimbangan pagu indikatif dan skala prioritas;
- c. Terwujudnya integritas, sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan progam dan kegiatan;
- d. Menjadi tolok ukur kinerja bagi aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan dalam menilai implementasi program serta kegiatan Tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan rencana kerja (RENJA) Tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berisi tentang Penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023 yang didasarkan pada tugas pokok dan fungsi serta kewenangan berdasarkan pasal 255, 256, dan 257 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Untuk mendukung arah kebijakan pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan antara lain peningkatan kapasitas birokrasi dan kelembagaan.

1.2. Landasan Hukum

Memuat dasar regulasi sebagai acuan kebijakan dalam perencanaan dan penganggaran.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan Pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengaju pada

hasil laporan kinerja tahunan PD dan/atau realisasi APBD untuk PD yang bersangkutan, dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program, kegiatan, sub kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya.

**2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

**2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.**

Dirumuskan berdasarkan analisis gambaran pelayanan PD, kajian hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra PD.

**2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.**

Berisikan Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

**2.5. Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.**

Berisikan hasil kajian terhadap program/kegiatan/sub kegiatan yang diusulkan paripara pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

**BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

**3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.**

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Renstra PD, sesuai dengan tupoksi OPD, isu-isu penting penyelenggaraan Pemda, diidentifikasi tujuan dan sasaran Perangkat Daerah pada tahun perencanaan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Memuat faktor-faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program/kegiatan/sub kegiatan.

**BAB V PENUTUP**

Memuat Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan dan Rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan meliputi 3 (tiga) hal, yaitu realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, realisasi program/kegiatan sub kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dan realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Selain itu juga dibahas mengenai implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD dan kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. Secara umum Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah di Provinsi Sulawesi Selatan untuk melaksanakan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Dalam melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan yang bersifat administratif maupun bersifat teknis secara proposional telah berjalan dengan baik. Indikator keberhasilan terhadap pelaksanaan tugas ini adalah adanya komitmen kerja yang baik antara kepala dinas beserta bawahannya dan penguasaan di bidang tugas masing-masing pegawai dengan baik.

Plafon anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 sebesar Rp. 44.653.050.060,00 dengan realisasi sebesar Rp. 43.964.272.865,00 atau 98,46% dengan tingkat capaian kinerja 99,72%.

Berikut Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program/kegiatan/sub kegiatan pada Renja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan dan Pencapaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

| NAMA ORGANISASI/<br>PROGRAM/ KEGIATAN                            | INDIKATOR KINERJA                                                             |        | JUMLAH<br>DANA (Rp) | REALISASI KINERJA |                  | CAPAIAN<br>KINERJA RENJA |       |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------|-------|
|                                                                  | TOLAK UKUR                                                                    | TARGET |                     | K                 | (Rp)             | Rp(%)                    | K (%) |
| Satuan Polisi Pamong Praja                                       |                                                                               |        | 44.653.050.060,0    |                   | 43.964.272.865,0 | 98,46                    | 99.72 |
| PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH PROVINSI      | Persentase Penurunan Temuan berdasarkan LHP                                   | 100 %  | 42.250.851.760,0    | 100 %             | 41.642.770.156,0 | 98.56                    | 99.83 |
|                                                                  | Persentase ASN Perangkat daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik      | 100 %  |                     | 100 %             |                  |                          |       |
|                                                                  | Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah                                | 100 %  |                     | 100 %             |                  |                          |       |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | % Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat | 100 %  | 303.007.800,0       | 100 %             | 285.391.943,0    | 94.19                    | 99.17 |

|                                                                                       |                                                                                                                                                                   |           |               |           |               |       |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-------|--------|
|                                                                                       | Daerah tepat waktu                                                                                                                                                |           |               |           |               |       |        |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                       | 3 Dokumen | 236.829.900,0 | 3 Dokumen | 230.634.096,0 | 97.38 | 100.00 |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                  | 1 Dokumen | 9.514.000,0   | 1 Dokumen | 6.054.000,0   | 63.63 | 100.00 |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                              | 1 Dokumen | 27.297.250,0  | 1 Dokumen | 23.478.197,0  | 86.01 | 100.00 |
| Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                  | 1 Dokumen | 5.739.500,0   | 1 Dokumen | 3.059.500,0   | 53.31 | 56.31  |
| Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                          | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                              | 1 Dokumen | 8.264.900,0   | 1 Dokumen | 7.484.900,0   | 90.56 | 100.00 |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja | 1 Laporan | 6.801.500,0   | 1 Laporan | 6.151.500,0   | 90.44 | 100.00 |

|                                                                               |                                                                                                                    |              |                         |              |                         |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|
|                                                                               | SKPD                                                                                                               |              |                         |              |                         |              |              |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                             | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat                                                                          | 4 Laporan    | 8.560.750,0             | 4 Laporan    | 8.529.750,0             | 99.64        | 100.00       |
| <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                 | <b>% Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu</b>                                                           | <b>100 %</b> | <b>20.303.107.206,0</b> | <b>100 %</b> | <b>20.036.009.805,0</b> | <b>98.68</b> | <b>99.92</b> |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                             | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                  | 12 Bulan     | 20.236.324.706,0        | 12 Bulan     | 19.986.391.857,0        | 98.76        | 100.00       |
| Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                     | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                     | 12 Dokumen   | 5.264.300,0             | 12 Dokumen   | 5.264.300,0             | 100.00       | 100.00       |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                   | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan    | 39.071.500,0            | 1 Laporan    | 21.911.948,0            | 56.08        | 56.10        |
| Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                         | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan                                           | 20 Dokumen   | 3.469.500,0             | 20 Dokumen   | 3.469.500,0             | 100.00       | 100.00       |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran yang disusun                        | 18 Laporan   | 18.977.200,0            | 18 Laporan   | 18.972.200,0            | 99.97        | 100.00       |

|                                                                  |                                                                                     |             |               |             |               |        |        |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|--------|--------|
| Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           | % Penyusunan dokumen Laporan Aset/Barang Perangkat Daerah Tepat Waktu               | 100 %       | 5.914.000,0   | 100 %       | 5.794.000,0   | 97.97  | 100.00 |
| Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD        | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                   | 2 Dokumen   | 1.234.500,0   | 2 Dokumen   | 1.234.500,0   | 100.00 | 100.00 |
| Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                          | 3 Laporan   | 4.679.500,0   | 3 Laporan   | 4.559.500,0   | 97.44  | 100.00 |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Rata-rata nilai perilaku pegawai Perangkat daerah berdasarkan penilaian Kinerja ASN | 100 %       | 145.394.000,0 | 100 %       | 144.925.490,0 | 99.68  | 100.00 |
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya           | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                              | 255 Paket   | 112.420.000,0 | 255 Paket   | 112.064.490,0 | 99.68  | 100.00 |
| Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                    | 340 Dokumen | 32.974.000,0  | 340 Dokumen | 32.861.000,0  | 99.66  | 100.00 |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | % Pemenuhan Administrasi Umum Kantor                                                | 100 %       | 399.240.100,0 | 100 %       | 377.647.389,0 | 94.59  | 96.40  |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | 57 Paket    | 2.242.000,0   | 57 Paket    | 2.242.000,0   | 100.00 | 100.00 |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                 | 250 Paket   | 6.700.000,0   | 250 Paket   | 6.486.400,0   | 96.81  | 100.00 |

|                                                                         |                                                                                       |              |                      |              |                      |              |               |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------|
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                               | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                           | 11550 Paket  | 10.825.000,0         | 11550 Paket  | 10.650.000,0         | 98.38        | 99.90         |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan          | 1 Dokumen    | 19.970.000,0         | 1 Dokumen    | 18.170.000,0         | 90.99        | 95.86         |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu                                               | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                              | 1 Laporan    | 10.864.000,0         | 1 Laporan    | 10.504.000,0         | 96.69        | 97.06         |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | 150 Laporan  | 343.087.600,0        | 150 Laporan  | 324.173.489,0        | 94.49        | 96.18         |
| Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                   | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                  | 5156 Dokumen | 5.551.500,0          | 5156 Dokumen | 5.421.500,0          | 97.66        | 98.00         |
| Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 Dokumen    |                      | 1 Dokumen    |                      |              |               |
| <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | <b>% Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>   | <b>100 %</b> | <b>234.882.500,0</b> | <b>100 %</b> | <b>233.847.836,0</b> | <b>99.56</b> | <b>100.00</b> |
| Pengadaan Mebel                                                         | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                    | 1 Paket      |                      | 1 Paket      |                      |              |               |
| Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                           | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                       | 1 Unit       | 50.000.000,0         | 1 Unit       | 49.737.646,0         | 99.48        | 100.00        |

|                                                                                                                    |                                                                                                        |              |                         |              |                         |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|---------------|
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                 | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                   | 8 Unit       | 184.882.500,0           | 8 Unit       | 184.110.190,0           | 99.58        | 100.00        |
| <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                        | <b>% Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                 | <b>100 %</b> | <b>20.484.894.154,0</b> | <b>100 %</b> | <b>20.222.733.663,0</b> | <b>98.72</b> | <b>100.00</b> |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan   | 17.772.000,0            | 12 Laporan   | 12.196.627,0            | 68.63        | 100.00        |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan                                                               | 12 Laporan   | 20.467.122.154,0        | 12 Laporan   | 20.210.537.036,0        | 98.75        | 100.00        |
| <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>% pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik</b>         | <b>100 %</b> | <b>374.412.000,0</b>    | <b>100 %</b> | <b>336.420.030,0</b>    | <b>89.85</b> | <b>90.07</b>  |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 25 Unit      | 261.228.000,0           | 25 Unit      | 229.145.710,0           | 87.72        | 88.10         |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 9 Unit       | 87.204.000,0            | 9 Unit       | 81.384.320,0            | 93.33        | 93.00         |

|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |              |                        |              |                        |              |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|---------------|
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang di pelihara                                                                    | 41 Unit      | 25.980.000,0           | 41 Unit      | 25.890.000,0           | 99.65        | 100.00        |
| <b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>                                                                                                         | <b>Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di Provinsi (SPM)</b> | <b>100 %</b> | <b>2.190.111.800,0</b> | <b>100 %</b> | <b>2.122.076.068,0</b> | <b>96.89</b> | <b>97.74</b>  |
| <b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>                                             | <b>Peningkatan Kualitas Pelayanan keamanan dan ketertiban Serta Perlindungan masyarakat</b>                            | <b>100 %</b> | <b>1.939.004.100,0</b> | <b>100 %</b> | <b>1.932.535.768,0</b> | <b>99.67</b> | <b>100.00</b> |
| Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan | Jumlah Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini                                   | 80 Kali      | 539.658.400,0          | 80 Kali      | 537.365.400,0          | 99.58        | 100.00        |
|                                                                                                                                                                     | Jumlah Tenaga Keamanan dari instansi vertical                                                                          | 12 Bulan     |                        | 12 Bulan     |                        |              |               |
|                                                                                                                                                                     | Jumlah Pembinaan dan Penyuluhan                                                                                        | 2 Kali       |                        | 2 Kali       |                        |              |               |
|                                                                                                                                                                     | Jumlah Pelaksanaan Pengamanan, dan Pengawasan                                                                          | 120 Kali     |                        | 120 Kali     |                        |              |               |
|                                                                                                                                                                     | Jumlah Pelaksanaan Patroli                                                                                             | 80 Kali      |                        | 80 Kali      |                        |              |               |

|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                 |            |                 |            |                 |       |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------|-----------------|-------|--------|
| Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa | Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan | 7 Kasus    | 1.191.995.500,0 | 7 Kasus    | 1.190.879.368,0 | 99.91 | 100.00 |
|                                                                                                                                                          | Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan | 35 kasus   |                 | 35 kasus   |                 |       |        |
| Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi                                          | 15 Dokumen | 48.966.700,0    | 15 Dokumen | 45.919.500,0    | 93.78 | 100.00 |
| Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                       | Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                             | 15 Dokumen |                 | 15 Dokumen |                 |       |        |

|                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                 |                      |                 |                      |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|--------------|--------------|
| Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia | Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya    | 200 Orang       | 158.383.500,0        | 200 Orang       | 158.371.500,0        | 99.99        | 100.00       |
| Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan | 2 Dokumen       |                      | 2 Dokumen       |                      |              |              |
| Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                         | Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia                                | 80 Unit         |                      | 80 Unit         |                      |              |              |
| <b>Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur</b>                                                                                        | <b>Jumlah Kasus pelanggaran Perda dan Pergub yang diselesaikan</b>                                        | <b>25 kasus</b> | <b>237.807.700,0</b> | <b>25 kasus</b> | <b>176.640.300,0</b> | <b>74.28</b> | <b>79.17</b> |
| Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur                                                                                            | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur            | 3 Laporan       | 71.755.600,0         | 3 Laporan       | 65.742.550,0         | 91.62        | 100.00       |
| Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan                                                                                      | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan                 | 65 Laporan      | 100.000.000,0        | 65 Laporan      | 94.997.650,0         | 95.00        | 100.00       |

|                                                                     |                                                                                                                                                                       |              |                      |              |                      |               |               |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------|---------------|
| Peraturan Gubernur                                                  | Peraturan Daerah dan Peraturan                                                                                                                                        |              |                      |              |                      |               |               |
| Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP                                                       | 25 Laporan   | 66.052.100,0         | 25 Laporan   | 15.900.100,0         | 24.07         | 25.02         |
| <b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi</b>      | <b>Preosentase Kuantitas PPNS terhadap ASN Satpol PP</b>                                                                                                              | <b>10 %</b>  | <b>13.300.000,0</b>  | <b>10 %</b>  | <b>12.900.000,0</b>  | <b>96.99</b>  | <b>100.00</b> |
| Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS                              | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda | 2 Laporan    | 13.300.000,0         | 2 Laporan    | 12.900.000,0         | 96.99         | 100.00        |
| <b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>                               | <b>Persentase Korban Bencana yang tertangani</b>                                                                                                                      | <b>100 %</b> | <b>150.315.700,0</b> | <b>100 %</b> | <b>144.023.741,0</b> | <b>95.81</b>  | <b>100.00</b> |
| <b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi</b>                   | <b>% Layanan Informasi Rawan Bencana</b>                                                                                                                              | <b>100 %</b> | <b>16.454.000,0</b>  | <b>100 %</b> | <b>16.454.000,0</b>  | <b>100.00</b> | <b>100.00</b> |
| Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi                           | Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi                                                                                                                | 1 Dokumen    | 16.454.000,0         | 1 Dokumen    | 16.454.000,0         | 100.00        | 100.00        |
| <b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap</b>              | <b>Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap</b>                                                                                                        | <b>100 %</b> | <b>82.188.600,0</b>  | <b>100 %</b> | <b>77.096.641,0</b>  | <b>93.80</b>  | <b>100.00</b> |

|                                                                                                  |                                                                                                                                     |              |                     |              |                     |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|
| <b>Bencana</b>                                                                                   | <b>Bencana</b>                                                                                                                      |              |                     |              |                     |              |               |
| Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana                                                        | Jumlah Aparatur Terkait dengan Kebencanaan di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana | 50 Orang     | 82.188.600,0        | 50 Orang     | 77.096.641,0        | 93.80        | 100.00        |
| <b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>                                              | <b>Cakupan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>                                                                         | <b>100 %</b> | <b>51.673.100,0</b> | <b>100 %</b> | <b>50.473.100,0</b> | <b>97.68</b> | <b>100.00</b> |
| Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana                               | Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana                                                  | 2 Dokumen    | 51.673.100,0        | 2 Dokumen    | 50.473.100,0        | 97.68        | 100.00        |
| <b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b> | <b>Cakupan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran</b>                                                                 | <b>100 %</b> | <b>61.770.800,0</b> | <b>100 %</b> | <b>55.402.900,0</b> | <b>89.69</b> | <b>92.90</b>  |
| <b>Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran</b>                                          | <b>Cakupan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran</b>                                                                     | <b>35 %</b>  | <b>60.225.050,0</b> | <b>35 %</b>  | <b>55.402.900,0</b> | <b>91.99</b> | <b>95.29</b>  |
| Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan                                               | Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan                                                                              | 1 Dokumen    | 11.998.900,0        | 1 Dokumen    | 11.550.900,0        | 96.27        | 100.00        |

|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                          |             |                    |             |              |       |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------|-------|--------|
| Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran                                                                                                                                                     | Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal                                                                                                                    |             |                    |             |              |       |        |
| Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota                                                                                                      | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota                                                                   | 1 Laporan   | 45.389.250,0       | 1 Laporan   | 43.852.000,0 | 96.61 | 100.00 |
| Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan      | 12 Dokumen  | 1.422.900,0        | 12 Dokumen  |              |       |        |
| Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota                                                 | Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota) | 45 Orang    | 1.414.000,0        | 45 Orang    |              |       |        |
| <b>Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan</b>                                                                                                 | <b>Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan</b>                                                              | <b>83 %</b> | <b>1.545.750,0</b> | <b>83 %</b> |              |       |        |

|                                                                                                             |                                                                                                                                  |           |             |           |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|--|--|--|
| Penyelamatan Non Kebakaran                                                                                  | Non Kebakaran                                                                                                                    |           |             |           |  |  |  |
| Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | 2 Laporan | 1.545.750,0 | 2 Laporan |  |  |  |

Berikut Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Tahun berjalan) dapat diuraikan pada Tabel TC. 29 sebagai berikut :

|   |    |    |      |    |                                                                |                                                                                                   |           |           |           |           |      |           |           |         |         |
|---|----|----|------|----|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|---------|---------|
| 1 |    |    |      |    | Urusan Wajib Pelayanan Daerah                                  |                                                                                                   |           |           |           |           |      |           |           |         |         |
| 1 | 05 |    |      |    | Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat      |                                                                                                   |           |           |           |           |      |           |           |         |         |
| 1 | 05 |    |      |    | Satuan Polisi Pamong Praja                                     |                                                                                                   |           |           |           |           |      |           |           |         |         |
| 1 | 05 | 01 |      |    | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI          | Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah                                                    | 100%      | 100%      | 100%      | 100%      | 100% | 100%      | 100%      | 100%    | 100,00% |
|   |    |    |      |    |                                                                | Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik                          | 100%      | 100%      | 100%      | 100%      | 100% | 100%      | 100%      | 100%    | 100,00% |
|   |    |    |      |    |                                                                | Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP                                                       | 100%      | 100%      | 100%      | 100%      | 100% | 100%      | 100%      | 100%    | 100,00% |
|   |    |    |      |    |                                                                |                                                                                                   |           |           |           |           |      |           |           |         |         |
| 1 | 05 | 01 | 1.01 |    | Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | % Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu | 100%      | 100%      | 100%      | 100%      | 100% | 100%      | 100%      | 100%    | 100,00% |
| 1 | 05 | 01 | 1.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun                                         | 2 Dokumen | -         | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 100% | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100,00% |         |
| 1 | 05 | 01 | 1.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                     | Jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun                                                             | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100,00% |         |
| 1 | 05 | 01 | 1.01 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD           | Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun                                                   | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100,00% |         |
| 1 | 05 | 01 | 1.01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                             | Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang tersusun                                                             | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100,00% |         |
| 1 | 05 | 01 | 1.01 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                   | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersusun                                                   | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100,00% |         |

| Kode |    |    |      |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan            | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Subkegiatan (Suboutput)            | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) |                  |         | Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan |           |
|------|----|----|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1    |    |    |      |    | 2                                                                                     | 3                                                                                          | 4                                                                    | 5                                                                                                          | 6                                                                                | 7                | 8=(7/6) | 9                                                                            | 10=(5+7+9)                                                                     | 11=(10/4) |
|      |    |    |      |    |                                                                                       |                                                                                            |                                                                      |                                                                                                            |                                                                                  |                  |         |                                                                              |                                                                                |           |
| 1    | 05 | 01 | 1.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan iktisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun    | 1 Dokumen                                                            | Dokumen                                                                                                    | 1 Dokumen                                                                        | 1 Dokumen        | 100%    | 1 Dokumen                                                                    | 1 Dokumen                                                                      | 100,00%   |
| 1    | 05 | 01 | 1.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun                             | 4 Dokumen                                                            | 24 Dokumen                                                                                                 | 4 Dokumen                                                                        | 4 Dokumen        | 100%    | 4 Dokumen                                                                    | 4 Dokumen                                                                      | 100,00%   |
| 1    | 05 | 01 | 1.02 |    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | % Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu                                          | 100%                                                                 | 100%                                                                                                       | 100%                                                                             | 100%             | 100%    | 100%                                                                         | 100%                                                                           | 100,00%   |
| 1    | 05 | 01 | 1.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Pembayaran gaji dan tunjangan ASN                                                          | 150 Orang/Bulan                                                      | 1 Tahun                                                                                                    | 1944 Orang/Bulan                                                                 | 1944 Orang/Bulan | 100%    | 1944 Orang/Bulan                                                             | 1944 Orang/Bulan                                                               | 1296,00%  |
| 1    | 05 | 01 | 1.02 | 04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                             | Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Akuntansi SKPD                                            | 12 Laporan                                                           | -                                                                                                          | 12 Bulan                                                                         | 12 Bulan         | 100%    | 12 Laporan                                                                   | 12 Laporan                                                                     | 100,00%   |
| 1    | 05 | 01 | 1.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun                                          | 1 Laporan                                                            | 27 Laporan                                                                                                 | 1 Laporan                                                                        | 1 Laporan        | 100%    | 1 Laporan                                                                    | 1 Laporan                                                                      | 100,00%   |
| 1    | 05 | 01 | 1.02 | 06 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                 | Jumlah Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang dikelola                                           | 20 Laporan                                                           | -                                                                                                          | 20 Laporan                                                                       | 20 Laporan       | 100%    | 20 Laporan                                                                   | 20 Laporan                                                                     | 100,00%   |
| 1    | 05 | 01 | 1.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan BulananTriwulananSemesteran SKPD           | Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran yang disusun | 18 Laporan                                                           | 2 Laporan                                                                                                  | 18 Laporan                                                                       | 18 Laporan       | 100%    | 18 Laporan                                                                   | 18 Laporan                                                                     | 100,00%   |
| 1    | 05 | 01 | 1.03 |    | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                | % Penyusunan dokumen Laporan Aset/Barang Perangkat Daerah Tepat Waktu                      | 100%                                                                 | -                                                                                                          | 100%                                                                             | 100%             | 100%    | 100%                                                                         | 100%                                                                           | 100,00%   |
| 1    | 05 | 01 | 1.03 | 01 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                             | Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah yang tersusun                     | 2 Dokumen                                                            | -                                                                                                          | 2 Dokumen                                                                        | 2 Dokumen        | 100%    | 2 Dokumen                                                                    | 2 Dokumen                                                                      | 100,00%   |
| 1    | 05 | 01 | 1.03 | 06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                           | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah yang tersusun                             | 3 Laporan                                                            | -                                                                                                          | 3 Dokumen                                                                        | 3 Dokumen        | 100%    | 3 Laporan                                                                    | 3 Laporan                                                                      | 100,00%   |

|   |    |    |      |    |                                                                        |                                                                               |             |           |             |             |      |             |             |         |
|---|----|----|------|----|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-------------|------|-------------|-------------|---------|
| 1 | 05 | 01 | 1.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                 | Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                           | 635 Orang   | 380 Orang | 255 Orang   | 80 Orang    | 31%  | 255 Orang   | 255 Orang   | 40,16%  |
| 1 | 05 | 01 | 1.05 | 03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                      | Jumlah Administrasi Kepegawaian                                               | 340 laporan | 30 Jenis  | 340,00      | 340,00      | 100% | 340 Jenis   | 340 Jenis   | #VALUE! |
| 1 | 05 | 01 | 1.06 |    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                     | % Pemenuhan Administrasi Umum Kantor                                          | 100%        | 100%      | 100%        | 100%        | 100% | 100%        | 100%        | 100,00% |
| 1 | 05 | 01 | 1.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor       | Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia   | 50 Unit     | 30 Unit   | 57,00       | 57,00       | 100% | 50 Unit     | 50 Unit     | 100,00% |
| 1 | 05 | 01 | 1.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                      | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga                                            | 250 Unit    | -         | 236 Unit    | 236 Unit    | 100% | 250 Unit    | 250 Unit    | 100,00% |
| 1 | 05 | 01 | 1.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                | Jumlah Cetak dan Penggandaan yang tersedia                                    | 18000 Jenis | 110 Jenis | 18625 Jenis | 18625 Jenis | 100% | 18000 Jenis | 18000 Jenis | 100,00% |
| 1 | 05 | 01 | 1.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan               | Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang tersedia                   | 12 Bulan    | 12 Bulan  | 1 Tahun     | 1 Tahun     | 100% | 12 Bulan    | 12 Bulan    | 100,00% |
| 1 | 05 | 01 | 1.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                              | Jumlah Jamuan Makanan dan Minuman yang tersedia                               | 100 Tamu    | 55,00     | 100 Tamu    | 100 Tamu    | 100% | 100 Tamu    | 100 Tamu    | 100,00% |
| 1 | 05 | 01 | 1.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang terlaksana                        | 4 Rapat     | 180 Kali  | 4 Rapat     | 4 Rapat     | 100% | 4 Rapat     | 4 Rapat     | 100,00% |
| 1 | 05 | 01 | 1.06 | 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                  | Jumlah Jenis Arsip Dinamis yang tertata                                       | 5000 Jenis  | -         | 5156 Jenis  | 5156 Jenis  | 100% | 5000 Jenis  | 5000 Jenis  | 100,00% |
| 1 | 05 | 01 | 1.06 | 11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Website yang tersedia                                                  | 1 Aplikasi  | -         | 1 Aplikasi  | 1 Aplikasi  | 100% | 1 Aplikasi  | 1 Aplikasi  | 100,00% |
| 1 | 05 | 01 | 1.07 |    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah       | % Pemenuhan Administrasi Umum Kantor                                          | 100%        | 100%      | 100%        | 100%        | 100% | 100%        | 100%        | 100,00% |
| 1 | 05 | 01 | 1.07 | 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                    | Jumlah kendaraan operasional roda 4                                           | 2 Unit      | -         | -           | -           | 0%   | -           | -           | 0,00%   |
| 1 | 05 | 01 | 1.07 | 05 | Pengadaan Mebel                                                        | Jumlah Mebel yang tersedia                                                    | 1 Paket     | -         | 1 Unit      | 1 Unit      | 100% | 1 Paket     | 1 Paket     | 100,00% |
| 1 | 05 | 01 | 1.07 | 09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                          | Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang tersedia                      | 1 Paket     | 15,00     | 1 Unit      | 1 Unit      | 100% | 1 Paket     | 1 Paket     | 100,00% |
| 1 | 05 | 01 | 1.07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya     | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang tersedia | 8 Unit      | 12,00     | 8 Unit      | 8 Unit      | 100% | 8 Unit      | 8 Unit      | 100,00% |

|   |    |         |      |    |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |                  |           |                |                |      |                  |                  |         |
|---|----|---------|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|----------------|----------------|------|------------------|------------------|---------|
| 1 | 05 | 01      | 1.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                          | Jumlah biaya tagihan telepon, Internet, air dan listrik                                                                                                                         | 12 Bulan         | 12 Bulan  | 12 Bulan       | 12 Bulan       | 100% | 12 Bulan         | 12 Bulan         | 100,00% |
| 1 | 05 | 01      | 1.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                           | Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                               | 5808 Orang/Bulan | 12 Bulan  | 1 Tahun        | 1 Tahun        | 100% | 5808 Orang/Bulan | 5808 Orang/Bulan | 100,00% |
| 1 | 05 | 01      | 1.09 |    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                           | % Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik                                                                                                   | 100%             | 100%      | 100%           | 100%           | 100% | 100%             | 100%             | 100,00% |
| 1 | 05 | 01      | 1.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                               | Jumlah Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terbayarkan                                                                          | 25 Unit          | 25 Unit   | 25 Unit        | 25 Unit        | 100% | 25 Unit          | 25 Unit          | 100,00% |
| 1 | 05 | 01      | 1.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                   | Jumlah Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Penzinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terbayarkan                                                                        | 9 Unit           | 13 Unit   | 9 Unit         | 9 Unit         | 100% | 9 Unit           | 9 Unit           | 100,00% |
| 1 | 05 | 01      | 1.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara                                                                                                                              | 41 Unit          | 150 Unit  | 41 Unit        | 41 Unit        | 100% | 41 Unit          | 41 Unit          | 100,00% |
| 1 | 05 | 1.05.02 |      |    | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                                                            | Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di Provinsi (SPM/Prioritas)                                                       | 100%             | 100%      | 100%           | 100%           | 100% | 100%             | 100%             | 100,00% |
| 1 | 05 | 1.05.02 | 01   |    | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                | Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban dan ketertiban umum Lintas Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                       | 100%             | 100%      | 100%           | 100%           | 100% | 100%             | 100%             | 100,00% |
| 1 | 05 | 1.05.02 | 01   | 01 | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini Pembinaan dan Penyuluhan Pelaksanaan Patroli Pengamanan dan Pengawasan | Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan           | 277 kasus        | 200 Orang | 80 Kali        | 80 Kali        | 100% | 80 Kali          | 80 Kali          | #VALUE! |
|   |    |         |      |    |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |                  | 80 Kali   | 75 Kali        | 75 Kali        | 100% | 75 Kali          | 75 Kali          | #DIV/0! |
|   |    |         |      |    |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |                  | 120 Kali  | 120 Kali       | 120 Kali       | 100% | 120 Kali         | 120 Kali         | #DIV/0! |
|   |    |         |      |    |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |                  | 90 Kali   | 2 Kali         | 2 Kali         | 100% | 2 Kali           | 2 Kali           | #DIV/0! |
|   |    |         |      |    |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |                  | 23 Orang  | 23 Orang/Bulan | 23 Orang/Bulan | 100% | 23 Orang/Bulan   | 23 Orang/Bulan   | #DIV/0! |
| 1 | 05 | 1.05.02 | 01   | 02 | Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa        | Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan | 45 Kasus         | 35 Kali   | 35 Kali        | 35 Kali        | 100% | 35 Kali          | 35 Kali          | #VALUE! |
|   |    |         |      |    |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |                  | 7 Kali    | 7 Kali         | 7 Kali         | 100% | 7 Kali           | 7 Kali           | #DIV/0! |

|   |    |         |    |    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                              |             |          |          |          |      |          |          |         |
|---|----|---------|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|----------|------|----------|----------|---------|
| 1 | 05 | 1.05.02 | 02 | 02 | Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur                                                           | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur                       | 70 Lapoaran | 20 Kali  | 10 Kali  | 10 Kali  | 100% | 10 Kali  | 10 Kali  | #VALUE! |
|   |    |         |    |    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                              |             | 10 Kali  | 55 Kali  | 55 Kali  | 100% | 55 Kali  | 55 Kali  | #DIV/0! |
| 1 | 05 | 1.05.02 | 02 | 03 | Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur                                                                              | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP                                              | 25 Lapoaran | 15 Kasus | 25 Kasus | 25 Kasus | 100% | 25 Kasus | 25 Kasus | #VALUE! |
| 1 | 05 | 1.05.02 | 03 |    | Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil PPNS Provinsi                                                                                            | Jumlah Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)                                                                                                        | 8 orang     | 100%     | 5%       | 0%       | 0%   | 10%      | 10%      | #VALUE! |
| 1 | 05 | 1.05.02 | 03 | 01 | Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS                                                                                                           | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman                         | 25 Laporan  | 35 Orang | 22 Orang | Orang    | 0%   | 25 Orang | 25 Orang | #VALUE! |
| 1 | 05 | 1.05.02 | 03 | 02 | Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS | Jumlah Dokumen Pemberkasan Administrasi Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda, Jumlah Perkara yang dapat disidangkan di tempat, dan penerapan secara aktif | 30 Dokumen  |          |          |          |      |          |          |         |

| 1 |    |         |    |    | 2                                                                                               | 3                                                                                                                     | 4         | 5        | 6        | 7      | 8=(7/6) | 9         | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
|---|----|---------|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|--------|---------|-----------|------------|-----------|
| 1 | 05 | 1.05.03 |    |    | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA                                                                  | Persentase Korban Bencana yang tertangani                                                                             | 100%      | 100%     | 100%     | 100%   | 100%    | 100%      | 100%       | 100,00%   |
|   |    |         |    |    |                                                                                                 | Persentase Aparat Kesiapsiagaan Bencana yang terlatih                                                                 | 100%      | 100%     | 100%     | 100%   | 100%    | 100%      | 100%       | 100,00%   |
| 1 | 05 | 1.05.03 | 01 |    | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi                                                      | % Layanan Informasi Rawan Bencana                                                                                     | 100%      | 100%     | -        | -      | #DIV/0! | 100%      | 100%       | 100,00%   |
| 1 | 05 | 1.05.04 | 01 | 01 | Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi                                                       | Jumlah dokumen kajian resiko bencana                                                                                  | (-)       | 3 Kali   | -        | -      | 0%      | 1 Dokumen | 1 Dokumen  | 100,00%   |
| 1 | 05 | 1.05.04 | 01 | 02 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana) | Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota | 80 Orang  | 70 Orang | 70 Orang | 100%   | 0%      | -         | -          | 100,00%   |
| 1 | 05 | 1.05.03 | 02 |    | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana                                         | Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana                                                       | 100%      | 100%     | 100%     | 100%   | 100%    | 100%      | 100%       | 100,00%   |
| 1 | 05 | 1.05.04 | 02 | 02 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana                                                       | Jumlah Aparatur Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana                 | 100 Orang | 60 Orang | 3 Kali   | 3 Kali | 100%    | 3 Kali    | 3 Kali     | #VALUE!   |
| 1 | 05 | 1.05.03 | 04 |    | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana                                                    | Cakupan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana                                                                  | 100%      | 100%     | 100%     | 100%   | 100%    | 100%      | 100%       | 100,00%   |
| 1 | 05 | 1.05.04 | 04 | 03 | Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana                              | Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana                                    | 2 Dokumen | -        | 2 Kali   | 2 Kali | 100%    | 2 Kali    | 2 Kali     | #VALUE!   |
| 1 | 05 | 1.05.04 |    |    | PROGRAM PENCEGAHAN PENANGGULANGAN PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN         | Persentase Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran (Prioritas)                                                            | 41%       | 100%     | 37%      | 37%    | 100%    | 40%       | 40%        | 97,56%    |
|   |    |         |    |    |                                                                                                 |                                                                                                                       | (-)       | 100%     | 82%      | 82%    | 100%    | 83%       | 83%        | #VALUE!   |
| 1 | 05 | 1.05.04 | 01 |    | Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran                                                | Cakupan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran                                                              | 50%       | 100%     | 25%      | 25%    | 100%    | 35%       | 35%        | 70,00%    |
| 1 | 05 | 1.05.04 | 01 | 01 | Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran           |                                                                                                                       | 0 Dokumen | 15 Kali  | -        | -      | 0%      | 1 Dokumen | 1 Dokumen  | 100,00%   |
| 1 | 05 | 1.05.04 | 01 | 03 | Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota               | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota                | 4 Laporan | 50 orang | -        | -      | 0%      | 2 kali    | 2 kali     | 100,00%   |

|   |    |         |    |    |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |            |          |        |        |      |             |             |         |
|---|----|---------|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------|--------|------|-------------|-------------|---------|
| 1 | 05 | 1.05.04 | 01 | 04 | Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan     | 12 dokumen | -        | -      | -      | 0%   | 12 Kab/kota | 12 Kab/kota | #VALUE! |
| 1 | 05 | 1.05.04 | 01 | 09 | Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota                                               | Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota | 2 Orang    | 60 Orang | 2 Kali | 2 Kali | 100% | 2 Kali      | 2 Kali      | #VALUE! |
| 1 | 05 | 1.05.04 | 02 |    | <b>Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran</b>                                                                    | <b>Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran</b>                                               | 85%        | 100%     | 82%    | 82%    | 100% | 83%         | 83%         | 97,65%  |
| 1 | 05 | 1.05.04 | 02 | 01 | Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran                                                                          | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran                                        | 24 Laporan | 50 Orang | 2 Kali | 2 Kali | 100% | 2 Kali      | 2 Kali      | #VALUE! |
| 1 | 05 | 1.05.04 | 02 | 01 | Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran                                                                       | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran                                       | 24 Laporan | 50 Orang | 2 Kali | 2 Kali | 100% | 2 Kali      | 2 Kali      | #VALUE! |

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan dibentuk melalui Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 309) dan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 07 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang memiliki tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- d. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan disajikan dalam tabel T-C.30 berikut :

Tabel T-C.30.  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja  
Provinsi Sulawesi Selatan

| No. | Indikator                                                                         | SPM/standar nasional                                                        | IKK                                                                         | Target Renstra Perangkat Daerah |                         |                       |                         | Realisasi Capaian       |                         | Proyeksi              |                         | Catatan Analisis |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
|     |                                                                                   |                                                                             |                                                                             | Tahun 2021<br>(thn n-2)         | Tahun 2022<br>(thn n-1) | Tahun 2023<br>(thn n) | Tahun 2024<br>(thn n+1) | Tahun 2021<br>(thn n-2) | Tahun 2022<br>(thn n-1) | Tahun 2023<br>(thn n) | Tahun 2024<br>(thn n+1) |                  |
| (1) | (2)                                                                               | (3)                                                                         | (4)                                                                         | (5)                             | (6)                     | (7)                   | (8)                     | (9)                     | (10)                    | (11)                  | (12)                    | (13)             |
| 1   | Nilai Sakip Perangkat Daerah                                                      | -                                                                           | Bobot Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah                                 | 70                              | 75                      | 80                    | 80                      | 70                      | 75                      | 80                    | 80                      |                  |
| 2   | Rata-Rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah                                        | -                                                                           | Prosentase Realisasi Fisik dan Keuangan atas Program/kegiatan /sub kegiatan | 100%                            | 100%                    | 100%                  | 100%                    | 100%                    | 100%                    | 100%                  | 100%                    |                  |
| 3   | Presentase ASN dengan Nilai SKP Kategori Baik                                     | -                                                                           | Prosentase SKP ASN berkinerja baik                                          | 100%                            | 100%                    | 100%                  | 100%                    | 100%                    | 100%                    | 100%                  | 100%                    |                  |
| 4   | Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindaklanjuti                                | -                                                                           | Prosentase Temuan Materil berdasarkan hasil audit                           | 100%                            | 100%                    | 100%                  | 100%                    | 100%                    | 100%                    | 100%                  | 100%                    |                  |
| 5   | Kuantitas Aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang profesional dan terlatih         | Peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat | Jumlah Aparat Satpol PP yang terlatih                                       | 550 Orang                       | 625 Orang               | 750 Orang             | 750 Orang               | 550 Orang               | 625 Orang               | 750 Orang             | 750 Orang               |                  |
| 6   | Presentase Aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang Berkompetensi Fungsional Khusus | Peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan            | Jumlah Aparat Satpol PP yang lulus/berkompeten pada setiap tes inpassing    | 100%                            | 100%                    | 100%                  | 100%                    | 100%                    | 100%                    | 100%                  | 100%                    |                  |

| No. | Indikator                                                                                 | SPM/standar nasional | IKK                                                   | Target Renstra Perangkat Daerah |                      |                    |                      | Realisasi Capaian    |                      | Proyeksi           |                      | Catatan Analisis |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|------------------|
|     |                                                                                           |                      |                                                       | Tahun 2021 (thn n-2)            | Tahun 2022 (thn n-1) | Tahun 2023 (thn n) | Tahun 2024 (thn n+1) | Tahun 2021 (thn n-2) | Tahun 2022 (thn n-1) | Tahun 2023 (thn n) | Tahun 2024 (thn n+1) |                  |
| (1) | (2)                                                                                       | (3)                  | (4)                                                   | (5)                             | (6)                  | (7)                | (8)                  | (9)                  | (10)                 | (11)               | (12)                 | (13)             |
|     |                                                                                           |                      |                                                       |                                 |                      |                    |                      |                      |                      |                    |                      |                  |
| 7   | Presentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                         |                      | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan          | 100%                            | 100%                 | 100%               | 100%                 | 100%                 | 100%                 | 100%               | 100%                 |                  |
| 8   | Kuantitas Petugas Perlindungan Masyarakat                                                 |                      | Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan | 42000 Orang                     | 42500 Orang          | 43000 Orang        | 43000 Orang          | 42000 Orang          | 42500 Orang          | 43000 Orang        | 43000 Orang          |                  |
| 9   | Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran k3 (Keterlibatan, Ketenteraman, Keterlibatan) |                      | Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan | 94%                             | 95%                  | 96%                | 96%                  | 94%                  | 95%                  | 96%                | 96%                  |                  |
| 10  | Persentase Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran                                            |                      |                                                       | 55%                             | 60%                  | 65%                | 65%                  | 55%                  | 60%                  | 65%                | 65%                  |                  |
| 11  | Persentase Respon Time Rate                                                               |                      |                                                       | 88%                             | 90%                  | 95%                | 95%                  | 88%                  | 90%                  | 95%                | 95%                  |                  |

### 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Aspek strategis Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 12 ayat 1 (satu) huruf e, disebutkan bahwa ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang harus diselenggarakan dan menjadi tugas dari Kepala Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan adalah tangan dari Kepala Daerah untuk membantu dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dibentuk untuk menegakan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta perlindungan masyarakat.

Suasana tentram dan tertib menjadi modal dasar baik dalam menjalankan roda pemerintahan dan roda perekonomian, kedua hal tersebut akan berjalan optimal apabila kondisi menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta perlindungan masyarakat tidak tercipta dengan baik oleh sebab itu, ketiga aspek pelayanan dasar tersebut menjadi aspek strategis bagi Satuan Polisi Pamong Praja sehingga pemerintah berkewajiban mendukung penguatan kelembagaan dan penganggaran guna menunjang pelaksanaan cipta kondisi trantibum serta perlindungan masyarakat yang kondusif dan berjalan secara optimal.

Isu strategis berkaitan dengan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta perlindungan masyarakat berdasarkan tugas pokok dan fungsi diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 07 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan Capaian Kinerja Pembangunan Tahun 2018-2023, juga melihat fakta permasalahan yang krusial dan tantangan pada tahun 2024-2026, maka dapat digambarkan perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yaitu :

1. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang belum memadai, terutama anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan yang bersertifikasi/memiliki keahlian khusus seperti intelijen, PPNS maupun pengadaan barang/jasa masih minim, tentu saja sangat berpengaruh terhadap kinerja pelayanan OPD;
2. Masih terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang ketugasan;
3. Koordinasi dan kerjasama antar instansi, kabupaten/kota, masyarakat, dan stake holders masih kurang;
4. Pengawasan dan Penegakan Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah belum optimal seiring dengan perkembangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang semakin kompleks;
5. Wilayah perbatasan rawan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum yang masih belum mendapat perhatian khusus. Dukungan anggaran dan kerjasama dengan mitra kerja/ instansi terkait sangat diperlukan;
6. Belum optimalnya koordinasi dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah;

7. Dampak dari penanganan Extra Ordinary (Luar Biasa) akibat pandemi Covid-19 menjadi persoalan, tantangan dan ujian bersama;

Pemasalahan dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat berdampak terhadap Pencapaian Rencana Kerja PD Provinsi Sulawesi Selatan paradigma Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat Dan Penegakan Peraturan Daerah yang sebelumnya responsif (tanggap darurat) menjadi preventif (kesiagaan), untuk itu perlu dilakukan peningkatan kapasitas aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan masyarakat dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, Perlindungan Masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah.

Rekomendasi Strategis dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan.

1. Aspek regulasi, perlu meningkatkan kompetensi serta kapasitas SDM dalam setiap organisasi, diperlukan sebuah kegiatan berupa Bimtek, Diklat (Pendidikan dan Pelatihan) yang berjenjang agar mendapatkan pengetahuan yang mungkin belum didapatkan atau sebagai penyegaran kembali (refreshing);
2. Aspek kebutuhan personil yang merupakan sebuah pondasi yang sangat penting dalam aktivitas sebuah organisasi. Keberhasilan kinerja dalam aktivitas juga sangat ditentukan oleh SDM, berdasarkan kualitas (kapasitas, kompetensi) dan kuantitas SDM. Permasalahan SDM Satpol PP lebih banyak dititik beratkan pada kuantitasnya. Tidak ada rekrutmen baru untuk anggota PNS. Di luar hal tersebut, SDM Satpol PP harus menerima beban pekerjaan yang semakin besar dan cenderung bersifat tidak teratur/bersifat ad hoc
3. Aspek sarana prasarana, untuk mendukung kegiatan operasi dibutuhkan sarana prasarana pendukung dengan mencoba mengusulkan kebutuhan untuk kegiatan patroli sesuai dengan SOP, bahwa Satpol PP melaksanakan patroli 3 (tiga) kali dalam sehari.
4. Aspek pembiayaan, jelas bahwa untuk mendukung kegiatan operasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat dibutuhkan anggaran yang memadai melalui usulan anggaran dalam program dan kegiatan.

#### **2.4. Review terhadap Rancangan Akhir RKPD**

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-OPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada RKPD dan RENSTRA Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam kedua dokumen tersebut, penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan belum menjadi kebijakan utuh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan karena masih menjadi bagian dalam kebijakan Kesbangpol. Atas dasar tersebut, perlu adanya komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, Perlindungan Masyarakat Dan Penegakan Peraturan Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan Permendagri Nomor 59 tahun 2021 tentang Standar

Pelayanan Minimal bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang tertuang dalam RKPD Provinsi Sulawesi Selatan untuk tahun-tahun mendatang.

Berdasarkan kebutuhan pendanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 bahwa Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sudah masuk dalam sub kegiatan, Satuan Polisi Pamong Praja masih membutuhkan sarana, prasarana dan anggaran yang memadai untuk membiaya program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan peraturan daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya pada awal penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mengacu kepada 4 (empat) Program, 16 (Enam Belas) Kegiatan dan 53 (Lima Puluh Tiga) Sub Kegiatan, Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2024 dapat dilihat pada tabel T-C.31.

| Tujuan                                                                       | Sasaran                                                                                                                | Kode            | Rancangan Awal RKPD                                              |                                                                                                      |                |                   | Hasil Analisis Kebutuhan                                         |                                                                                                      |                                                   |                   | Lokasi           |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|------------------|------|--|
|                                                                              |                                                                                                                        |                 | Program, Kegiatan dan Subkegiatan                                | Indikator Kinerja                                                                                    | target Capaian | Pagu Indikatif    | Program, Kegiatan dan Subkegiatan                                | Indikator Kinerja                                                                                    | Indikator Kinerja                                 | Pagu Indikatif    |                  |      |  |
| (1)                                                                          | (2)                                                                                                                    | (3)             | (4)                                                              | (5)                                                                                                  | (6)            | (7)               | (8)                                                              | (9)                                                                                                  | (10)                                              | (11)              | (12)             |      |  |
| Meningkatkan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan Satuan Polisi Pamong Praja |                                                                                                                        |                 |                                                                  | Nilai SAKIP OPD                                                                                      | BB             |                   |                                                                  |                                                                                                      | A                                                 |                   |                  |      |  |
|                                                                              | Meningkatnya Capaian Kinerja Program penyelenggaraan Urusan Ketenteraman Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat |                 |                                                                  | Nilai Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program                                                    | 100%           |                   |                                                                  |                                                                                                      | 100%                                              |                   |                  |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                        | 1.05.01         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI            | Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindaklanjuti                                                   | 100 %          | 42.889.885.374,00 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI            | Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindaklanjuti                                                   | 100 %                                             | 43.548.885.374,00 |                  |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                        |                 |                                                                  | Persentase ASN berkinerja baik dan sangat baik                                                       | 100 %          |                   |                                                                  | 0,00                                                                                                 | Persentase ASN berkinerja baik dan sangat baik    |                   | 100 %            | 0,00 |  |
|                                                                              |                                                                                                                        |                 |                                                                  | Nilai Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program                                                    | 100 %          |                   |                                                                  | 0,00                                                                                                 | Nilai Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program |                   | 100 %            | 0,00 |  |
|                                                                              |                                                                                                                        | 1.05.01.1.01    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                       | 11 Dokumen     | 508.343.100,00    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                       | 11 Dokumen                                        | 548.343.100,00    |                  |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                        | 1.05.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                          | 12 Dokumen     | 330.000.000,00    | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                          | 12 Dokumen                                        | 330.000.000,00    | SULAWESI SELATAN |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                        | 1.05.01.1.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                      | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                     | 1 Dokumen      | 15.000.000,00     | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                      | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                     | 1 Dokumen                                         | 25.000.000,00     | SULAWESI SELATAN |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                        | 1.05.01.1.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD             | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen      | 63.343.100,00     | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD             | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen                                         | 63.343.100,00     | SULAWESI SELATAN |      |  |

|                         |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                        |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                        |                   |                  |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------------|
| 1.05.0<br>1.1.01.<br>04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | 1<br>Dokumen           | 15.000.000,00     | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | 1<br>Dokumen           | 25.000.000,00     | SULAWESI SELATAN |
| 1.05.0<br>1.1.01.<br>05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                         | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   | 1<br>Dokumen           | 20.000.000,00     | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                         | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   | 1<br>Dokumen           | 30.000.000,00     | SULAWESI SELATAN |
| 1.05.0<br>1.1.01.<br>06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1<br>Laporan           | 30.000.000,00     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1<br>Laporan           | 30.000.000,00     | SULAWESI SELATAN |
| 1.05.0<br>1.1.01.<br>07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 4<br>Laporan           | 35.000.000,00     | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 4<br>Laporan           | 45.000.000,00     | SULAWESI SELATAN |
| 1.05.0<br>1.1.02        | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                  | 32<br>Laporan          | 21.120.742.755,00 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                  | 32<br>Laporan          | 21.198.742.755,00 |                  |
| 1.05.0<br>1.1.02.<br>01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 150<br>Orang/<br>Bulan | 20.975.617.755,00 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 150<br>Orang/<br>Bulan | 20.975.617.755,00 | SULAWESI SELATAN |
| 1.05.0<br>1.1.02.<br>04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                             | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                                         | 12<br>Dokumen          | 67.052.000,00     | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                             | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                                         | 12<br>Dokumen          | 77.052.000,00     | SULAWESI SELATAN |
| 1.05.0<br>1.1.02.<br>05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | 1<br>Laporan           | 21.107.000,00     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | 1<br>Laporan           | 54.107.000,00     | SULAWESI SELATAN |
| 1.05.0<br>1.1.02.<br>06 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                 | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan                                                                                               | 20<br>Dokumen          | 10.516.000,00     | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                 | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan                                                                                               | 20<br>Dokumen          | 35.516.000,00     | SULAWESI SELATAN |

|                         |                                                                                |                                                                                                                                                   |                |                |                                                                                |                                                                                                                                                   |                |                |                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| 1.05.0<br>1.1.02.<br>07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 18<br>Laporan  | 46.450.000,00  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 18<br>Laporan  | 56.450.000,00  | SULAWESI SELATAN |
| 1.05.0<br>1.1.03        | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                         | Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dikelola oleh Perangkat Daerah                                                                                    | 300 Unit       | 22.000.000,00  | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                         | Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dikelola oleh Perangkat Daerah                                                                                    | 320 Unit       | 62.000.000,00  |                  |
| 1.05.0<br>1.1.03.<br>01 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                      | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                 | 2<br>Dokumen   | 10.000.000,00  | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                      | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                 | 2<br>Dokumen   | 30.000.000,00  | SULAWESI SELATAN |
| 1.05.0<br>1.1.03.<br>02 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                            | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                | 3<br>Dokumen   | 12.000.000,00  | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                            | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                | 3<br>Dokumen   | 32.000.000,00  | SULAWESI SELATAN |
| 1.05.0<br>1.1.05        | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                      | Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                          | 350<br>Laporan | 275.800.000,00 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                      | Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                          | 360<br>Laporan | 455.800.000,00 |                  |
| 1.05.0<br>1.1.05.<br>02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                         | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                                                            | 148<br>Paket   | 205.800.000,00 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                         | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                                                            | 148<br>Paket   | 255.800.000,00 | SULAWESI SELATAN |
| 1.05.0<br>1.1.05.<br>03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                              | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                                                  | 148<br>Dokumen | 70.000.000,00  | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                              | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                                                  | 148<br>Dokumen | 200.000.000,00 | SULAWESI SELATAN |
| 1.05.0<br>1.1.06        | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                             | Jumlah Unit Penyediaan Sarana dan Prasarana Umum                                                                                                  | 250 Unit       | 547.551.000,00 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                             | Jumlah Unit Penyediaan Sarana dan Prasarana Umum                                                                                                  | 250 Unit       | 732.551.000,00 |                  |
|                         |                                                                                | Jumlah Tamu Yang difasilitasi                                                                                                                     | 120<br>Orang   | 0,00           |                                                                                | Jumlah Tamu Yang difasilitasi                                                                                                                     | 120<br>Orang   | 0,00           |                  |
| 1.05.0<br>1.1.06.<br>01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor               | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                | 50<br>Paket    | 7.500.000,00   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor               | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                | 50<br>Paket    | 32.500.000,00  | SULAWESI SELATAN |

|                         |                                                                        |                                                                                       |             |                |                                                                        |                                                                                       |             |                |                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|------------------|
| 1.05.0<br>1.1.06.<br>02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                           | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                        | 250 Paket   | 17.250.000,00  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                           | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                        | 250 Paket   | 27.250.000,00  | SULAWESI SELATAN |
| 1.05.0<br>1.1.06.<br>05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                             | 180 Paket   | 52.800.000,00  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                             | 180 Paket   | 62.800.000,00  | SULAWESI SELATAN |
| 1.05.0<br>1.1.06.<br>06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan               | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan          | 12 Dokumen  | 24.200.000,00  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan               | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan          | 12 Dokumen  | 44.200.000,00  | SULAWESI SELATAN |
| 1.05.0<br>1.1.06.<br>08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                              | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                              | 12 Laporan  | 17.250.000,00  | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                              | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                              | 12 Laporan  | 47.250.000,00  | SULAWESI SELATAN |
| 1.05.0<br>1.1.06.<br>09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | 100 Laporan | 300.000.000,00 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | 100 Laporan | 340.000.000,00 | SULAWESI SELATAN |
| 1.05.0<br>1.1.06.<br>10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                  | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                  | 500 Dokumen | 28.551.000,00  | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                  | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                  | 500 Dokumen | 28.551.000,00  | SULAWESI SELATAN |
| 1.05.0<br>1.1.06.<br>11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 Dokumen   | 100.000.000,00 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 Dokumen   | 150.000.000,00 | SULAWESI SELATAN |
| 1.05.0<br>1.1.07        | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah       | Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah                                                  | 9 Unit      | 450.000.000,00 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah       | Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah                                                  | 9 Unit      | 580.000.000,00 |                  |
| 1.05.0<br>1.1.07.<br>01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan      | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan   | 2 Unit      | 100.000.000,00 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan      | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan   | 4 Unit      | 180.000.000,00 | SULAWESI SELATAN |
| 1.05.0<br>1.1.07.<br>02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                    | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                 | 2 Unit      | 100.000.000,00 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                    | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                 | 2 Unit      | 100.000.000,00 | SULAWESI SELATAN |

|                         |                                                                                                                    |                                                                                                        |                   |                          |                                                                                                                    |                                                                                                        |                   |                          |                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------|
| 1.05.0<br>1.1.07.<br>05 | Pengadaan Mebel                                                                                                    | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                     | 1 Paket           | 50.000.000,00            | Pengadaan Mebel                                                                                                    | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                     | 1 Paket           | 50.000.000,00            | SULAWESI SELATAN |
| 1.05.0<br>1.1.07.<br>09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                      | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                        | 1 Unit            | 100.000.000,00           | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                      | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                        | 1 Unit            | 150.000.000,00           | SULAWESI SELATAN |
| 1.05.0<br>1.1.07.<br>11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                       | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan         | 1 Unit            | 100.000.000,00           | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                       | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan         | 1 Unit            | 100.000.000,00           | SULAWESI SELATAN |
| 1.05.0<br>1.1.08        | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                        | <b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                             | <b>24 Laporan</b> | <b>19.270.448.519,00</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                        | <b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                             | <b>24 Laporan</b> | <b>19.276.448.519,00</b> |                  |
| 1.05.0<br>1.1.08.<br>02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan        | 29.598.000,00            | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan        | 35.598.000,00            | SULAWESI SELATAN |
| 1.05.0<br>1.1.08.<br>04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan        | 19.240.850.519,00        | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan        | 19.240.850.519,00        | SULAWESI SELATAN |
| 1.05.0<br>1.1.09        | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>                                                         | <b>76 Unit</b>    | <b>695.000.000,00</b>    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>                                                         | <b>85 Unit</b>    | <b>695.000.000,00</b>    |                  |
| 1.05.0<br>1.1.09.<br>01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 25 Unit           | 275.000.000,00           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 25 Unit           | 275.000.000,00           | SULAWESI SELATAN |

|                                                                          |                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                                  |                                                                                                                            |         |                  |                                                                                                                  |                                                                                                                            |         |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|------------------|
|                                                                          |                                                                                                                                                 | 1.05.0<br>1.1.09.<br>02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                     | 9 Unit  | 200.000.000,00   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                     | 9 Unit  | 200.000.000,00   | SULAWESI SELATAN |
|                                                                          |                                                                                                                                                 | 1.05.0<br>1.1.09.<br>06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                         | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                         | 41 Unit | 100.000.000,00   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                         | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                         | 41 Unit | 100.000.000,00   | SULAWESI SELATAN |
|                                                                          |                                                                                                                                                 | 1.05.0<br>1.1.09.<br>11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                     | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                   | 1 Unit  | 120.000.000,00   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                     | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                   | 1 Unit  | 120.000.000,00   | SULAWESI SELATAN |
| Mewujudkan Tatahan Kehidupan Masyarakat yang Aman, Tenteraman dan Tertib |                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                                  | Persentase Penurunan Gangguan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban (K3)                                                   | 100%    |                  |                                                                                                                  |                                                                                                                            | 100%    |                  |                  |
|                                                                          | Terwujudnya Penyelesaian Gangguan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Penanggulangan Bencana Daerah dan Bencana Kebakaran Kab/Kota |                         |                                                                                                                  | Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban umum)                                 | 100%    |                  |                                                                                                                  |                                                                                                                            | 100%    |                  |                  |
|                                                                          |                                                                                                                                                 | 1.05.0<br>2             | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                             | Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi                  | 100 %   | 4.085.000.000,00 | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                             | Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi                  | 100 %   | 5.206.000.000,00 |                  |
|                                                                          |                                                                                                                                                 | 1.05.0<br>2.1.01        | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Persentase Penanganan Gangguan Ketemtraman dan ketertiban umum Lintas Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | 100%    | 3.045.000.000,00 | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Persentase Penanganan Gangguan Ketemtraman dan ketertiban umum Lintas Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | 100%    | 3.945.000.000,00 |                  |

|                         |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                 |            |                  |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                 |            |                  |                  |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------------|
| 1.05.0<br>2.1.01.<br>01 | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan | Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan           | 277 Kasus  | 750.000.000,00   | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan | Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan           | 277 Kasus  | 830.000.000,00   | SULAWESI SELATAN |
| 1.05.0<br>2.1.01.<br>02 | Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa            | Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan | 45 Kasus   | 1.300.000.000,00 | Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa            | Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan | 55 Kasus   | 1.700.000.000,00 | SULAWESI SELATAN |
| 1.05.0<br>2.1.01.<br>03 | Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi                                          | 16 Dokumen | 230.000.000,00   | Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi                                          | 16 Dokumen | 270.000.000,00   | SULAWESI SELATAN |
| 1.05.0<br>2.1.01.<br>04 | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                                  | Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                             | 50 Dokumen | 100.000.000,00   | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                                  | Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                             | 50 Dokumen | 130.000.000,00   | SULAWESI SELATAN |
| 1.05.0<br>2.1.01.<br>05 | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia            | Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya                                                                          | 240 Orang  | 280.000.000,00   | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia            | Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya                                                                          | 240 Orang  | 450.000.000,00   | SULAWESI SELATAN |
| 1.05.0<br>2.1.01.<br>06 | Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan                                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan                                                                       | 5 Dokumen  | 50.000.000,00    | Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan                                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan                                                                       | 5 Dokumen  | 70.000.000,00    | SULAWESI SELATAN |

|                         |                                                                                               |                                                                                                                                        |                |                       |                                                                                               |                                                                                                                                        |                |                         |                  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|------------------|
| 1.05.0<br>2.1.01.<br>07 | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum              | Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia                                                             | 150 Unit       | 250.000.000,00        | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum              | Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia                                                             | 250 Unit       | 350.000.000,00          | SULAWESI SELATAN |
| 1.05.0<br>2.1.01.<br>08 | Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat                                    | Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan                                     | 10 Dokumen     | 35.000.000,00         | Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat                                    | Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan                                     | 10 Dokumen     | 45.000.000,00           | SULAWESI SELATAN |
| 1.05.0<br>2.1.01.<br>09 | Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani                                                               | 2 Laporan      | 50.000.000,00         | Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani                                                               | 2 Laporan      | 100.000.000,00          | SULAWESI SELATAN |
| 1.05.0<br>2.1.02        | <b>Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur</b>                             | <b>Presentase Tingkat Penyelesaian Kasus Pelanggaran Perda dan Perkada</b>                                                             | <b>100 %</b>   | <b>840.000.000,00</b> | <b>Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur</b>                             | <b>Presentase Tingkat Penyelesaian Kasus Pelanggaran Perda dan Perkada</b>                                                             | <b>100 %</b>   | <b>1.031.000.000,00</b> |                  |
| 1.05.0<br>2.1.02.<br>01 | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur                                 | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur                                         | 3 Laporan      | 320.000.000,00        | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur                                 | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur                                         | 3 Laporan      | 401.000.000,00          | SULAWESI SELATAN |
| 1.05.0<br>2.1.02.<br>02 | Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur        | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur | 70 Laporan     | 220.000.000,00        | Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur        | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur | 70 Laporan     | 280.000.000,00          | SULAWESI SELATAN |
| 1.05.0<br>2.1.02.<br>03 | Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur                           | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP                        | 25 Laporan     | 300.000.000,00        | Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur                           | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP                        | 25 Laporan     | 350.000.000,00          | SULAWESI SELATAN |
| 1.05.0<br>2.1.03        | <b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi</b>                                | <b>Jumlah Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)</b>                                                                           | <b>8 Orang</b> | <b>200.000.000,00</b> | <b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi</b>                                | <b>Jumlah Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)</b>                                                                           | <b>8 Orang</b> | <b>230.000.000,00</b>   |                  |

|                                                                                                                                                   |                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                       |                   |                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                       |               |                |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------------|
|                                                                                                                                                   | 1.05.0<br>2.1.03.<br>01 | Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS                                                          | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda | 25<br>Laporan     | 150.000.000,00 | Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS                                                          | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda | 25<br>Laporan | 150.000.000,00 | SULAWESI SELATAN |
|                                                                                                                                                   |                         | Pembentukan Sekretariat PPNS                                                                    | Surat keputusan kepala daerah tentang pembentukan sekretariat PPNS                                                                                                    | 1 Surat keputusan | 10.000.000,00  | Pembentukan Sekretariat PPNS                                                                    | Surat keputusan kepala daerah tentang pembentukan sekretariat PPNS                                                                                                    | 0             | 0,00           |                  |
|                                                                                                                                                   | 1.05.0<br>2.1.03.<br>02 | Dukungan Operasional Sekretariat PPNS                                                           | Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS                                                                                                                         | 20<br>laporan     | 40.000.000,00  | Dukungan Operasional Sekretariat PPNS                                                           | Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS                                                                                                                         | 22<br>Laporan | 50.000.000,00  | SULAWESI SELATAN |
| Terwujudnya Penyelesaian Gangguan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Penanggunalangan Bencana Daerah dan Bencana Kebakaran Kab/Kota |                         |                                                                                                 | Persentase Penurunan Korban Bencana                                                                                                                                   |                   |                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                       |               |                |                  |
|                                                                                                                                                   | 1.05.0<br>3             | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA                                                                  | Persentase Korban Bencana yang tertangani                                                                                                                             | 100 %             | 725.000.000,00 | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA                                                                  | Persentase Korban Bencana yang tertangani                                                                                                                             | 100 %         | 845.000.000,00 |                  |
|                                                                                                                                                   | 1.05.0<br>3.1.01        | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi                                                      | Presentase Layanan Informasi Rawan Bencana                                                                                                                            | 100 %             | 325.000.000,00 | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi                                                      | Presentase Layanan Informasi Rawan Bencana                                                                                                                            | 100 %         | 355.000.000,00 |                  |
|                                                                                                                                                   | 1.05.0<br>3.1.01.<br>02 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana) | Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota                                                 | 80 Orang          | 325.000.000,00 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana) | Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota                                                 | 80 Orang      | 355.000.000,00 | SULAWESI SELATAN |
|                                                                                                                                                   | 1.05.0<br>3.1.02        | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana                                         | Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana                                                                                                       | 100 %             | 300.000.000,00 | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana                                         | Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana                                                                                                       | 100 %         | 350.000.000,00 |                  |

|                                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                                        |           |                |                                                                                           |                                                                                                        |           |                |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------------|
| 1.05.0<br>3.1.02.<br>02                                                                                                                         | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana                                                 | Jumlah Aparatur Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana  | 100 Orang | 300.000.000,00 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana                                                 | Jumlah Aparatur Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana  | 100 Orang | 350.000.000,00 | SULAWESI SELATAN |
| 1.05.0<br>3.1.04                                                                                                                                | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana                                              | Cakupan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana                                                   | 100 %     | 100.000.000,00 | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana                                              | Cakupan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana                                                   | 100 %     | 140.000.000,00 |                  |
| 1.05.0<br>3.1.04.<br>03                                                                                                                         | Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana                       | Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana                     | 2 Dokumen | 100.000.000,00 | Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana                       | Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana                     | 2 Dokumen | 140.000.000,00 | SULAWESI SELATAN |
| Terwujudnya Penyelesaian Gangguan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Penanggulangan Bencana Daerah dan Bencana Kebakaran Kab/Kota |                                                                                           | Persentase Kasus Kebakaran yang ditangani Sesuai Respon Time Rate                                      |           |                |                                                                                           |                                                                                                        |           |                |                  |
| 1.05.0<br>4                                                                                                                                     | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran                                                                    | 100 %     | 346.858.377,00 | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran                                                                    | 100 %     | 446.858.377,00 |                  |
| 1.05.0<br>4.1.01                                                                                                                                | Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran                                          | Cakupan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran                                               | 50 %      | 146.155.000,00 | Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran                                          | Cakupan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran                                               | 50 %      | 246.155.000,00 |                  |
| 1.05.0<br>4.1.01.<br>03                                                                                                                         | Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota         | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota | 4 Laporan | 76.500.000,00  | Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota         | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota | 4 Laporan | 176.500.000,00 | SULAWESI SELATAN |

|  |  |                         |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          |               |                   |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          |               |                |                   |  |
|--|--|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------------------|--|
|  |  | 1.05.0<br>4.1.01.<br>04 | Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan      | 12<br>Dokumen | 20.000.000,00     | Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan      | 12<br>Dokumen | 20.000.000,00  | SULAWESI SELATAN  |  |
|  |  | 1.05.0<br>4.1.01.<br>09 | Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota                                                  | Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota) | 2 Orang       | 49.655.000,00     | Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota                                                  | Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota) | 2 Orang       | 49.655.000,00  | SULAWESI SELATAN  |  |
|  |  | 1.05.0<br>4.1.02        | Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran                                                                              | Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran                                                       | 100%          | 200.703.377,00    | Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran                                                                              | Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran                                                       | 100 % %       | 200.703.377,00 |                   |  |
|  |  | 1.05.0<br>4.1.02.<br>01 | Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran                                                                             | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran                                         | 24<br>Laporan | 90.703.377,00     | Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran                                                                             | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran                                         | 24<br>Laporan | 90.703.377,00  | SULAWESI SELATAN  |  |
|  |  | 1.05.0<br>4.1.02.<br>02 | Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran                                                                            | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran                                        | 24<br>Laporan | 110.000.000,00    | Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran                                                                            | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran                                        | 24<br>Laporan | 110.000.000,00 |                   |  |
|  |  |                         |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          |               | 48.046.743.751,00 |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          |               |                | 49.046.743.751,00 |  |

Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat

Program, kegiatan dan sub kegiatan masyarakat sepenuhnya diusulkan dari bidang teknis dan Sekretariat dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan. Usulan-usulan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut selanjutnya dievaluasi berdasarkan isu-isu strategis yang terdapat dalam masyarakat dengan disinkronkan sesuai tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan.

Selanjutnya seluruh usulan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan untuk menyelaraskan dengan kebijakan perencanaan dan penganggaran yang ada. Adapun usulan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel T-C.32 berikut :

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2024 belum melaksanakan Penelaahan Usulan Program, kegiatan dan sub kegiatan kepada masyarakat yang secara langsung menjadi program kegiatan dan sub kegiatan yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada Tabel T-C.32 berikut :

Tabel T-C.32.  
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024  
Provinsi Sulawesi Selatan

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja

| No  | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/ Volume | Catatan |
|-----|------------------|--------|-------------------|-----------------|---------|
| (1) | (2)              | (3)    | (4)               | (5)             | (6)     |
| -   | -                | -      | -                 | -               | -       |
|     |                  |        |                   |                 |         |
|     |                  |        |                   |                 |         |
|     |                  |        |                   |                 |         |
|     |                  |        |                   |                 |         |
|     |                  |        |                   |                 |         |
|     |                  |        |                   |                 |         |

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 merupakan penjabaran dari RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024. serta merujuk pada prioritas pembangunan Nasional sebagaimana termuat dalam RKP Tahun 2023 dan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023.

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Prioritas Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 untuk mewujudkan visi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026, yaitu : “

- 1. Sasaran Pokok RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan 2005-2025;
- 2. Capaian Kinerja RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023
- 3. 7 Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024;
- 4. Permasalahan dan Isu-isu strategis Pembangunan Daerah

Sehubungan dengan hal tersebut, Perumusan Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan mengacu pada mekanisme yang tercantum Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 dengan mempertimbangkan seluruh elemen, baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta

Adapun Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Selatan periode 2024 -2026 sebagai berikut:

- **Tujuan (1) Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik**
  - **sasaran 1 : meningkatnya akuntabilitaskinerja pemerintahan daerah**
  - **sasaran 2 : berkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**
- **Tujuan (2) Meningkatkan Pemerataan Infrastruktur Wilayah**
  - **Sasaran 3 : Meningkatkan Akseibilitas Infrastruktur Wilayah**
- **Tujuan (3) Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat secara merata**
  - **Sasaran 4 : Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sektor unggulan daerah**
  - **Sasaran 5 : Menurunnya kesenjangan Pendapatan antar lapisan masyarakat**
- **Tujuan (4) Meningkatkan Kualitas SDM yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter**
  - **Sasaran 6 : Meningkatnya Kualitas danPemerataan Pendidikan**
  - **Sasaran 7 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat**
  - **Sasaran 8 : Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam pembangunan**
  - **Sasaran 9 : Meningkatnya aktualisas nilai-nilai agama dan budaya**

*dalam kehidupan masyarakat*

- **Tujuan (5) Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah**
  - **Sasaran 10 : Meningkatkan hilirisasi ekonomi sektor unggulan daerah**
- **Tujuan (6) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan**
  - **Sasaran 11 : Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim**

Dari rumusan Tujuan RPD tersebut, dapat diidentifikasi keterkaitannya dengan tugas dan fungsi satuan polisi pamong praja , yaitu pada:

- **Tujuan (1) Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik**
  - **Sasaran 1 : Meningkatnya Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah**
  - **Sasaran 2 : berkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**

**3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga lainnya yang melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun dalam Program Bina Administrasi Kewilayahan dengan sasaran program yaitu meningkatnya konsolidasi dan koordinasi kebijakan penguatan peran gubernur sebagai wakil Pemerintah, peningkatan pelayanan publik dan kerjasama daerah, serta penataan wilayah administrasi dan kawasan (kawasan khusus dan kawasan perkotaan), dan batas antar Negara; serta meningkatnya standardisasi dan kualitas implementasi teknis kebijakan bidang Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat serta pencegahan dan penganggulangan bencana dan bahaya kebakaran. Adapun Indikator Kegiatan Program (IKP) Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, yaitu:

- a. Presentase kinerja peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. Penerapan kebijakan pelayanan publik di daerah;
- c. Tertibnya penataan wilayah administrasi batas antar daerah;

- d. Peningkatan efektivitas kerjasama perbatasan antar negara di 3 (tiga) negara tetangga di kawasan perbatasan wilayah darat;
- e. Penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM (Standar Pelayanan Minimal);
- f. Penyediaan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM (Standar Pelayanan Minimal).

Tujuan dan Sasaran merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi dengan didasarkan pada isu–isu dan analisis strategik dan juga merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 s/d 5 tahunan. Tujuan ini tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam Renja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024- 2026 yaitu :

- 1. Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang baik;  
dan sasaran dalam pencapaian tujuan yang akan dilaksanakan, yaitu :
  - 1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan;
  - 2. Berkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan merupakan sesuatu yang akan dicapai dimasa yang akan datang. Perumusan tujuan akan mengarahkan kepada perumusan sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan.

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Provinsi Sulawesi Selatan, pada dasarnya sub kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai Perangkat Daerah yang memiliki fungsi dalam penyelenggaraan penegakan Peraturan Perundang–undangan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan. Sejalan dengan Misi Pertama ‘Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif’ dan Misi Keempat ‘Pembangunan manusia yang kompetitif dan inklusif.

Program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD maka Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan 2024 terdiri atas 4 (Empat) Program, 15 (Lima Belas) Kegiatan dan 55 (Lima

Puluh Lima) Sub Kegiatan dengan jumlah pagu indikatif sebesar Rp. 48.046.743.751,00. Rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel T-C.33.

TABEL T-C.33  
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024  
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025 PROVINSI SULAWESI SELATAN

| Kode            | Program, Kegiatan dan Subkegiatan                                | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)     | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                                |             |                 |                                   |                                | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab | Lokasi           |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
|                 |                                                                  |                                                                                                      | Rencana Tahun 2024 ( Tahun rencana )          |                                |             | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                                |                                              |                  |
|                 |                                                                  |                                                                                                      | target capaian kinerja                        | Kebutuhan Dana /Pagu indikatif | Sumber dana |                 | target capaian kinerja            | Kebutuhan Dana /Pagu indikatif |                                              |                  |
| 1.05.01         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI            | Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindaklanjuti                                                   | 100 %                                         | 42.889.885.374,00              | APBD        |                 | 100 %                             | 43.049.885.374,00              | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA                   | SULAWESI SELATAN |
|                 |                                                                  | Persentase ASN berkinerja baik dan sangat baik                                                       | 100 %                                         | 0,00                           |             |                 | 100 %                             | 0,00                           |                                              |                  |
|                 |                                                                  | Nilai Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program                                                    | 100 %                                         | 0,00                           |             |                 | 100 %                             | 0,00                           |                                              |                  |
| 1.05.01.1.01    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                       | 11 Dokumen                                    | 508.343.100,00                 | APBD        |                 | 11 Dokumen                        | 508.343.100,00                 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA                   | SULAWESI SELATAN |
| 1.05.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                          | 12 Dokumen                                    | 330.000.000,00                 | APBD        |                 | 12 Dokumen                        | 330.000.000,00                 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA                   | SULAWESI SELATAN |
| 1.05.01.1.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                      | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                     | 1 Dokumen                                     | 15.000.000,00                  | APBD        |                 | 1 Dokumen                         | 15.000.000,00                  | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA                   | SULAWESI SELATAN |
| 1.05.01.1.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD             | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen                                     | 63.343.100,00                  | APBD        |                 | 1 Dokumen                         | 63.343.100,00                  | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA                   | SULAWESI SELATAN |

|                     |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                   |                          |             |  |                   |                          |                            |                  |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------|--|-------------------|--------------------------|----------------------------|------------------|
| 1.05.01.1.01.04     | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen         | 15.000.000,00            | APBD        |  | 1 Dokumen         | 15.000.000,00            | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | SULAWESI SELATAN |
| 1.05.01.1.01.05     | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                         | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen         | 20.000.000,00            | APBD        |  | 1 Dokumen         | 20.000.000,00            | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | SULAWESI SELATAN |
| 1.05.01.1.01.06     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan         | 30.000.000,00            | APBD        |  | 1 Laporan         | 30.000.000,00            | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | SULAWESI SELATAN |
| 1.05.01.1.01.07     | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 4 Laporan         | 35.000.000,00            | APBD        |  | 4 Laporan         | 35.000.000,00            | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | SULAWESI SELATAN |
| <b>1.05.01.1.02</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                         | <b>Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                                                           | <b>32 Laporan</b> | <b>21.120.742.755,00</b> | <b>APBD</b> |  | <b>32 Laporan</b> | <b>21.160.742.755,00</b> | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |                  |
| 1.05.01.1.02.01     | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 150 Orang/ Bulan  | 20.975.617.755,00        | APBD        |  | 150 Orang/ Bulan  | 20.975.617.755,00        | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | SULAWESI SELATAN |
| 1.05.01.1.02.04     | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                             | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                                         | 12 Dokumen        | 67.052.000,00            | APBD        |  | 12 Dokumen        | 77.052.000,00            | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | SULAWESI SELATAN |
| 1.05.01.1.02.05     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | 1 Laporan         | 21.107.000,00            | APBD        |  | 1 Laporan         | 41.107.000,00            | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | SULAWESI SELATAN |
| 1.05.01.1.02.06     | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                 | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan                                                                                               | 20 Dokumen        | 10.516.000,00            | APBD        |  | 20 Dokumen        | 20.516.000,00            | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | SULAWESI SELATAN |
| 1.05.01.1.02.07     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD        | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                      | 18 Laporan        | 46.450.000,00            | APBD        |  | 18 Laporan        | 46.450.000,00            | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | SULAWESI SELATAN |

|                 |                                                                  |                                                                                    |             |                |      |  |             |                |                            |                  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|------|--|-------------|----------------|----------------------------|------------------|
| 1.05.01.1.03    | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           | Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dikelola oleh Perangkat Daerah                     | 300 Unit    | 22.000.000,00  | APBD |  | 310 Unit    | 22.000.000,00  | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |                  |
| 1.05.01.1.03.01 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD        | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                  | 2 Dokumen   | 10.000.000,00  | APBD |  | 2 Dokumen   | 10.000.000,00  | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | SULAWESI SELATAN |
| 1.05.01.1.03.02 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                              | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                 | 3 Dokumen   | 12.000.000,00  | APBD |  | 3 Dokumen   | 12.000.000,00  | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | SULAWESI SELATAN |
| 1.05.01.1.05    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                           | 350 Laporan | 275.800.000,00 | APBD |  | 360 Laporan | 275.800.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |                  |
| 1.05.01.1.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya           | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                             | 148 Paket   | 205.800.000,00 | APBD |  | 148 Paket   | 205.800.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | SULAWESI SELATAN |
| 1.05.01.1.05.03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                   | 148 Dokumen | 70.000.000,00  | APBD |  | 148 Dokumen | 70.000.000,00  | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | SULAWESI SELATAN |
| 1.05.01.1.06    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Unit Penyediaan Sarana dan Prasarana Umum                                   | 250 Unit    | 547.551.000,00 | APBD |  | 250 Unit    | 581.551.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |                  |
|                 |                                                                  | Jumlah Tamu Yang difasilitasi                                                      | 120 Orang   | 0,00           | APBD |  | 120 Orang   | 0,00           |                            |                  |
| 1.05.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 50 Paket    | 7.500.000,00   | APBD |  | 50 Paket    | 7.500.000,00   | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | SULAWESI SELATAN |
| 1.05.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 250 Paket   | 17.250.000,00  | APBD |  | 250 Paket   | 17.250.000,00  | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | SULAWESI SELATAN |
| 1.05.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          | 180 Paket   | 52.800.000,00  | APBD |  | 180 Paket   | 52.800.000,00  | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | SULAWESI SELATAN |
| 1.05.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       | 12 Dokumen  | 24.200.000,00  | APBD |  | 12 Dokumen  | 24.200.000,00  | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | SULAWESI SELATAN |

|                     |                                                                              |                                                                                                |                   |                          |             |  |                   |                          |                            |                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------|--|-------------------|--------------------------|----------------------------|------------------|
| 1.05.01.1.06.08     | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                    | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                       | 12 Laporan        | 17.250.000,00            | APBD        |  | 12 Laporan        | 37.250.000,00            | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | SULAWESI SELATAN |
| 1.05.01.1.06.09     | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            | 100 Laporan       | 300.000.000,00           | APBD        |  | 100 Laporan       | 314.000.000,00           | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | SULAWESI SELATAN |
| 1.05.01.1.06.10     | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                        | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                           | 500 Dokumen       | 28.551.000,00            | APBD        |  | 500 Dokumen       | 28.551.000,00            | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | SULAWESI SELATAN |
| 1.05.01.1.06.11     | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD       | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD          | 1 Dokumen         | 100.000.000,00           | APBD        |  | 1 Dokumen         | 100.000.000,00           | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | SULAWESI SELATAN |
| <b>1.05.01.1.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>      | <b>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah</b>                                                    | <b>9 Unit</b>     | <b>450.000.000,00</b>    | <b>APBD</b> |  | <b>9 Unit</b>     | <b>530.000.000,00</b>    | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |                  |
| 1.05.01.1.07.01     | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan            | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan            | 2 Unit            | 100.000.000,00           | APBD        |  | 4 Unit            | 180.000.000,00           | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | SULAWESI SELATAN |
| 1.05.01.1.07.02     | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                          | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                          | 2 Unit            | 100.000.000,00           | APBD        |  | 2 Unit            | 100.000.000,00           | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | SULAWESI SELATAN |
| 1.05.01.1.07.05     | Pengadaan Mebel                                                              | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                             | 1 Paket           | 50.000.000,00            | APBD        |  | 1 Paket           | 50.000.000,00            | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | SULAWESI SELATAN |
| 1.05.01.1.07.09     | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                | 1 Unit            | 100.000.000,00           | APBD        |  | 1 Unit            | 100.000.000,00           | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | SULAWESI SELATAN |
| 1.05.01.1.07.11     | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit            | 100.000.000,00           | APBD        |  | 1 Unit            | 100.000.000,00           | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | SULAWESI SELATAN |
| <b>1.05.01.1.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  | <b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                     | <b>24 Laporan</b> | <b>19.270.448.519,00</b> | <b>APBD</b> |  | <b>24 Laporan</b> | <b>19.276.448.519,00</b> | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |                  |
| 1.05.01.1.08.02     | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan         | 12 Laporan        | 29.598.000,00            | APBD        |  | 12 Laporan        | 35.598.000,00            | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | SULAWESI SELATAN |

|                     |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                            |                |                         |             |  |                |                         |                            |                  |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-------------|--|----------------|-------------------------|----------------------------|------------------|
| 1.05.01.1.08.04     | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                       | 12 Laporan     | 19.240.850.519,00       | APBD        |  | 12 Laporan     | 19.240.850.519,00       | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | SULAWESI SELATAN |
| <b>1.05.01.1.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                    | <b>Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>                                                                                                             | <b>76 Unit</b> | <b>695.000.000,00</b>   | <b>APBD</b> |  | <b>85 Unit</b> | <b>695.000.000,00</b>   | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |                  |
| 1.05.01.1.09.01     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan              | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya                                                     | 25 Unit        | 275.000.000,00          | APBD        |  | 25 Unit        | 275.000.000,00          | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | SULAWESI SELATAN |
| 1.05.01.1.09.02     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                     | 9 Unit         | 200.000.000,00          | APBD        |  | 9 Unit         | 200.000.000,00          | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | SULAWESI SELATAN |
| 1.05.01.1.09.06     | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                         | 41 Unit        | 100.000.000,00          | APBD        |  | 41 Unit        | 100.000.000,00          | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | SULAWESI SELATAN |
| 1.05.01.1.09.11     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                    | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                   | 1 Unit         | 120.000.000,00          | APBD        |  | 1 Unit         | 120.000.000,00          | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | SULAWESI SELATAN |
| <b>1.05.02</b>      | <b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>                                                                     | <b>Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi</b>                                           | <b>100 %</b>   | <b>4.085.000.000,00</b> | <b>APBD</b> |  | <b>100 %</b>   | <b>4.815.000.000,00</b> | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |                  |
| <b>1.05.02.1.01</b> | <b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>         | <b>Persentase Penanganan Gangguan Ketemtraman dan ketertiban umum Lintas Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>                          | <b>100%</b>    | <b>3.045.000.000,00</b> | <b>APBD</b> |  | <b>100%</b>    | <b>3.655.000.000,00</b> | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |                  |
| 1.05.02.1.01.01     | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan | Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan | 277 Kasus      | 750.000.000,00          | APBD        |  | 277 Kasus      | 790.000.000,00          | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | SULAWESI SELATAN |

|                 |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                 |            |                  |             |  |            |                  |                            |                  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-------------|--|------------|------------------|----------------------------|------------------|
|                 | Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan                                                                                                                      | Pengawasan                                                                                                                                                                      |            |                  |             |  |            |                  |                            |                  |
| 1.05.02.1.01.02 | Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa | Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan | 45 Kasus   | 1.300.000.000,00 | <b>APBD</b> |  | 50 Kasus   | 1.500.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | SULAWESI SELATAN |
| 1.05.02.1.01.03 | Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi                                          | 16 Dokumen | 230.000.000,00   | <b>APBD</b> |  | 16 Dokumen | 270.000.000,00   | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | SULAWESI SELATAN |
| 1.05.02.1.01.04 | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                       | Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                             | 50 Dokumen | 100.000.000,00   | <b>APBD</b> |  | 50 Dokumen | 130.000.000,00   | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | SULAWESI SELATAN |
| 1.05.02.1.01.05 | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia | Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya                                                                          | 240 Orang  | 280.000.000,00   | <b>APBD</b> |  | 240 Orang  | 450.000.000,00   | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | SULAWESI SELATAN |
| 1.05.02.1.01.06 | Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan                                                                       | 5 Dokumen  | 50.000.000,00    | <b>APBD</b> |  | 5 Dokumen  | 50.000.000,00    | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | SULAWESI SELATAN |
| 1.05.02.1.01.07 | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                         | Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia                                                                                                      | 150 Unit   | 250.000.000,00   | <b>APBD</b> |  | 200 Unit   | 350.000.000,00   | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | SULAWESI SELATAN |
| 1.05.02.1.01.08 | Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat                                                                                               | Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan                                                                              | 10 Dokumen | 35.000.000,00    | <b>APBD</b> |  | 10 Dokumen | 35.000.000,00    | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | SULAWESI SELATAN |

|                     |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                |                       |             |  |                |                       |                            |                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-------------|--|----------------|-----------------------|----------------------------|------------------|
| 1.05.02.1.01.09     | Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                    | Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani                                                                                                                                               | 2 Laporan      | 50.000.000,00         | APBD        |  | 2 Laporan      | 80.000.000,00         | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | SULAWESI SELATAN |
| <b>1.05.02.1.02</b> | <b>Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur</b>                                                                                | <b>Presentase Tingkat Penyelesaian Kasus Pelanggaran Perda dan Perkada</b>                                                                                                                                             | <b>100 %</b>   | <b>840.000.000,00</b> | <b>APBD</b> |  | <b>100 %</b>   | <b>960.000.000,00</b> | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |                  |
| 1.05.02.1.02.01     | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur                                                                                    | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur                                                                                                                         | 3 Laporan      | 320.000.000,00        | APBD        |  | 3 Laporan      | 370.000.000,00        | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | SULAWESI SELATAN |
| 1.05.02.1.02.02     | Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur                                                           | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur                                                                                 | 70 Laporan     | 220.000.000,00        | APBD        |  | 70 Laporan     | 240.000.000,00        | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | SULAWESI SELATAN |
| 1.05.02.1.02.03     | Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur                                                                              | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP                                                                                                        | 25 Laporan     | 300.000.000,00        | APBD        |  | 25 Laporan     | 350.000.000,00        | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | SULAWESI SELATAN |
| <b>1.05.02.1.03</b> | <b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi</b>                                                                                   | <b>Jumlah Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)</b>                                                                                                                                                           | <b>8 Orang</b> | <b>200.000.000,00</b> | <b>APBD</b> |  | <b>8 Orang</b> | <b>200.000.000,00</b> | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |                  |
| 1.05.02.1.03.01     | Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS                                                                                                           | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda                                                  | 25 Laporan     | 150.000.000,00        | APBD        |  | 25 Laporan     | 150.000.000,00        | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | SULAWESI SELATAN |
| 1.05.02.1.03.02     | Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS | Jumlah Dokumen Pemberkasan Administrasi Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda, Jumlah Perkara yang dapat disidangkan di tempat, dan penerapan secara aktif operasional Sekretariat Bersama PPNS oleh Dinas Satpol PP | 30 Dokumen     | 50.000.000,00         | APBD        |  | 30 Dokumen     | 50.000.000,00         | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | SULAWESI SELATAN |

|                 |                                                                                                  |                                                                                                                       |              |                       |             |  |              |                       |                            |                  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------|--|--------------|-----------------------|----------------------------|------------------|
| 1.05.03         | <b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>                                                            | <b>Persentase Korban Bencana yang tertangani</b>                                                                      | <b>100 %</b> | <b>725.000.000,00</b> | <b>APBD</b> |  | <b>100 %</b> | <b>835.000.000,00</b> | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |                  |
| 1.05.03.1.01    | <b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi</b>                                                | <b>Presentase Layanan Informasi Rawan Bencana</b>                                                                     | <b>100 %</b> | <b>325.000.000,00</b> | <b>APBD</b> |  | <b>100 %</b> | <b>355.000.000,00</b> | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |                  |
| 1.05.03.1.01.02 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)  | Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota | 80 Orang     | 325.000.000,00        | <b>APBD</b> |  | 80 Orang     | 355.000.000,00        | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | SULAWESI SELATAN |
| 1.05.03.1.02    | <b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>                                   | <b>Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana</b>                                                | <b>100 %</b> | <b>300.000.000,00</b> | <b>APBD</b> |  | <b>100 %</b> | <b>350.000.000,00</b> | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |                  |
| 1.05.03.1.02.02 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana                                                        | Jumlah Aparatur Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana                 | 100 Orang    | 300.000.000,00        | <b>APBD</b> |  | 100 Orang    | 350.000.000,00        | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | SULAWESI SELATAN |
| 1.05.03.1.04    | <b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>                                              | <b>Cakupan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>                                                           | <b>100 %</b> | <b>100.000.000,00</b> | <b>APBD</b> |  | <b>100 %</b> | <b>130.000.000,00</b> | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |                  |
| 1.05.03.1.04.03 | Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana                              | Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana                                    | 2 Dokumen    | 100.000.000,00        | <b>APBD</b> |  | 2 Dokumen    | 130.000.000,00        | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | SULAWESI SELATAN |
| 1.05.04         | <b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b> | <b>Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran</b>                                                                            | <b>100 %</b> | <b>346.858.377,00</b> | <b>APBD</b> |  | <b>100 %</b> | <b>346.858.377,00</b> | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |                  |
| 1.05.04.1.01    | <b>Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran</b>                                          | <b>Cakupan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran</b>                                                       | <b>50 %</b>  | <b>146.155.000,00</b> | <b>APBD</b> |  | <b>50 %</b>  | <b>146.155.000,00</b> | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |                  |
| 1.05.04.1.01.03 | Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota                | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota                | 4 Laporan    | 76.500.000,00         | <b>APBD</b> |  | 4 Laporan    | 76.500.000,00         | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | SULAWESI SELATAN |

|                 |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          |            |                   |      |  |            |                   |                            |                  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|------|--|------------|-------------------|----------------------------|------------------|
| 1.05.04.1.01.04 | Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan      | 12 Dokumen | 20.000.000,00     | APBD |  | 12 Dokumen | 20.000.000,00     | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | SULAWESI SELATAN |
| 1.05.04.1.01.09 | Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota                                                  | Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota) | 2 Orang    | 49.655.000,00     | APBD |  | 2 Orang    | 49.655.000,00     | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | SULAWESI SELATAN |
| 1.05.04.1.02    | <b>Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran</b>                                                                       | <b>Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran</b>                                                | 100%       | 200.703.377,00    | APBD |  | 100%       | 200.703.377,00    | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |                  |
| 1.05.04.1.02.01 | Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran                                                                             | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran                                         | 24 Laporan | 90.703.377,00     | APBD |  | 24 Laporan | 90.703.377,00     | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | SULAWESI SELATAN |
| 1.05.04.1.02.02 | Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran                                                                            | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran                                        | 24 Laporan | 110.000.000,00    | APBD |  | 24 Laporan | 110.000.000,00    | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |                  |
|                 |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          |            | 48.046.743.751,00 |      |  |            | 49.046.743.751,00 |                            |                  |

**BAB V**  
**PENUTUP**

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 ini merupakan rencana kerja tahunan yang disusun berdasarkan Rencana kerja perangkat daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026.

Rencana Kerja ini juga merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024, sehingga target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Rencana Kerja Satuan Polis Pamong Praja Tahun 2024 merupakan dokumen rencana operasional pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2024, guna mendukung pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek tahun 2024.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut sebagai upaya dalam mendukung capaian indikator kinerja maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh aparaturnya Satuan Polisi Pamong Praja berkewajiban untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rencana Kerja 2024 dengan efektif dan efisien;
2. Rencana Kerja Tahun 2024 sebagai langkah awal dalam penyusunan Anggaran Tahun 2024 dimana Rencana Kerja di jabarkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integritas dan efesiensi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja seluruh aparaturnya secara berjenjang wajib melaksanakan pengawasan dan pengendalian;
4. Rencana Kerja Tahun 2024 mengacu pada Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Rencana Kerja Tahun 2024 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan penerapan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Demikian Dokumen Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 disusun dan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2024.

Makassar, 03 Oktober 2023

**Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Provinsi Sulawesi Selatan**

**ANDI ARWIN AZIS, S.STP., MM**  
Pangkat Pembina Utama Madya  
NIP. 19760105 199511 1 001